

## BIBLIOGRAPHY

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
- Darmayani,D., & Herianti,E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *Jurnal InFestasi*, 13(1), 275-284.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Administrasi*. Retrieved June 8, 2018 from <http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Undang-Undang KUP Dan Peraturan Pelaksanaanya*. Retrieved June 15, 2018 from <http://www.pajak.go.id/content/buku-undang-undang-kup-dan-peraturan-pelaksanaanya>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A Dan B Terpadu* (24<sup>th</sup> ed.). Jakarta: Author.
- Indonesia-Investments. (2017). *Penduduk Indonesia*. Retrieved December 21, 2017 from <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67?>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *APBN-P 2016*. Retrieved March 7, 2018 from <https://www.kemenkeu.go.id/apbnp2016/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Kesuma, A. I. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebagai Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, 12 (2), 273.
- Kothari, C.R. (2004). *Research Methodology: Methods And Techniques*. New Delhi: New Age International

- Kusumadewi, M.A. (2014). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Di KPP Pratama Semarang Gayamsari. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro*.
- Lubis, I. (2015). *Mahir Akuntansi Pajak Terapan Berbasis Standar Akuntansi & Ketentuan Pajak Terbaru*. Yogyakarta:Penerbit ANDI.
- Online Pajak. (2016). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 Tentang Kebijakan Pemeriksaan
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2006). Strengthening Tax Audit Capabilities: General Principles and Approaches. Retrieved from <https://www.oecd.org/tax/administration/37589900.pdf>
- Ortax. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Ortax. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/ 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 0.3/ 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
- Pohan, C.A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori Dan Konsep Hukum Pajak*. (2<sup>nd</sup> ed.)Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pratama, N.P., Dwiatmanto, & Agusti, R.R. (2016). Pengaruh Inflasi, Permeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010 Sampai 2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Primerdo, R.Y. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta). *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Ragimun. (2013). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia. *Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI*.
- Rahayu, S. (2016). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Badan Pasal 25 Pada Kantor

- Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. *Skripsi Universitas Narotama*.
- Rahmawati, F.N., Santoso, S., & Hamidi, N. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret*, 3(1), 72-82.
- Ratna Sari, M.M., & Afriyanti, N.N. (2012). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Universitas Udayana*.
- Rosdiana, H., & Irianto, E.S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sambodo, A. (2015). *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Susanti, E., Zirman, & Diyanto, V. (2014). Pengaruh wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29 pada kantor pelayanan pajak pratama tampan pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(2), 2-4.
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak* (4<sup>th</sup> ed). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wildaniashri, & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *E-Proceeding of Management*, 2(1), 571.
- Yeni, R. (2013). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 1(1).
- Zainuddin, Ghodang, H., & Hantono. (2014). *Konsep Dasar & Aplikasi Statistik Pendekatan SPSS*. Bandung: Ciptapustaka Media